Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 33191-33203

Kebijakan Pengembangan Mutu Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa

Yunita Kwartarani[1], Eko handoyo[2], Fathur Rokhman[3]
[1,2,3]Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri semarang.
Corresponding Author: Yunita Kwartarani, yunita_kwartarani@students.unnes.ac.id

ABSTRAK
Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam membangun daya saing bangsa di era globalisasi dan transformasi digital. Kajian ini membahas kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompetitif. Penelitian ini menelaah arah, prinsip, serta implementasi kebijakan pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, pemerataan akses pendidikan, dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program seperti *Merdeka Belajar*, *Kampus Merdeka*, dan digitalisasi sekolah untuk mendorong inovasi pembelajaran dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi meliputi ketimpangan mutu antarwilayah, keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah 3T, rendahnya literasi digital guru, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan berbasis data. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk memastikan efektivitas peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Upaya strategis yang direkomendasikan meliputi desentralisasi pendidikan yang kontekstual, peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem asesmen formatif, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif. Selain kompetensi akademik, penguatan karakter peserta didik melalui program *Profil Pelajar Pancasila* menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, etika, dan gotong royong dalam menghadapi tantangan global. Dengan implementasi kebijakan yang sinergis, sistem pendidikan Indonesia diharapkan mampu menciptakan generasi emas 2045 yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global.

Kata kunci: mutu pendidikan, kebijakan nasional, daya saing bangsa, Merdeka Belajar, sumber daya manusia.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis arah, strategi, dan implementasi kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing bangsa; mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut; serta merumuskan strategi inovatif yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan pendidikan berbasis bukti, karakter, dan keadilan sosial.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa dan menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang kini bergerak menuju era *Society 5.0*, pendidikan tidak lagi hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun daya saing nasional melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kreatif, adaptif, dan berorientasi pada inovasi. Negara dengan kualitas pendidikan tinggi umumnya memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang kuat, stabilitas sosial yang baik, serta kemampuan inovatif yang mampu mendorong kemajuan peradaban. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia menjadi agenda prioritas yang tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga ideologis, karena berhubungan langsung dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konseptual, mutu pendidikan mengandung dimensi yang kompleks. Ia tidak sekadar diukur dari capaian akademik atau angka kelulusan, melainkan juga dari kemampuan sistem pendidikan dalam membentuk insan yang berkarakter, produktif, dan berdaya cipta. UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas meliputi aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang melingkupinya. Di Indonesia, kompleksitas ini semakin nyata ketika mutu pendidikan harus menjangkau wilayah geografis yang luas dan beragam, dengan karakteristik sosial yang berbeda antara daerah perkotaan, perdesaan, hingga wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Kesenjangan mutu pendidikan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam dua dekade terakhir. Meskipun berbagai kebijakan strategis telah diluncurkan oleh pemerintah, seperti program *Merdeka Belajar*, *Kampus Merdeka*, revitalisasi pendidikan vokasi, dan transformasi digital pembelajaran, namun capaian pendidikan nasional masih menunjukkan adanya disparitas antarwilayah dan antarjenjang pendidikan. Data *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2022 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi ke-71 dari 81 negara dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Rendahnya hasil PISA mencerminkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan implementatif yang memerlukan perbaikan sistemik.

Lebih jauh, Human Development Index (HDI) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Indonesia pada skor 0,720—meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun masih berada pada kategori menengah. Komponen pendidikan, khususnya *expected years of schooling* (rata-rata harapan lama sekolah) dan *mean years of schooling* (rata-rata lama sekolah), masih relatif rendah dibanding negara-negara dengan tingkat pembangunan setara. Data ini memperlihatkan bahwa walaupun akses pendidikan semakin luas, kualitas hasil belajar (learning outcomes) belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini menuntut pembenahan kebijakan pengembangan mutu pendidikan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Pendidikan yang bermutu tidak hanya berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana membentuk identitas nasional dan karakter kebangsaan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pendidikan memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, gotong royong, dan kebinekaan yang menjadi kekuatan utama bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan tidak boleh terjebak pada orientasi teknokratis semata, melainkan juga harus menjamin terbentuknya manusia Indonesia yang utuh: cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan tangguh secara moral. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berintegritas dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Kebijakan pengembangan mutu pendidikan harus dilihat sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, guru, masyarakat, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada penguatan kompetensi abad ke-21, yaitu kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, dan kreativitas. Keempat kompetensi ini menjadi pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengembangan mutu pendidikan sering kali menghadapi hambatan di tingkat pelaksanaan. Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan realisasi di lapangan. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan memang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai konteks lokal, tetapi sering kali menimbulkan variasi dalam standar mutu dan tata kelola pendidikan. Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia yang kuat mampu mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara efektif, sementara daerah lain tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, kompetensi guru, dan manajemen sekolah. Kondisi ini memperkuat pentingnya pendekatan desentralisasi yang adaptif, yaitu kebijakan yang memberi ruang inovasi lokal tanpa mengabaikan standar nasional mutu pendidikan.

Dari sisi sumber daya manusia, guru memiliki peran sentral dalam menentukan mutu pembelajaran. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai agen perubahan dan fasilitator belajar. Namun, data Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30% guru di Indonesia belum memiliki sertifikasi pendidik, dan sebagian besar masih menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan

teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan profesional guru masih perlu diperkuat, baik dalam aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Upaya peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem pelatihan yang relevan, mentoring, coaching, serta insentif berbasis kinerja agar guru termotivasi untuk terus berinovasi dalam pembelajaran.

Selain guru, kepala sekolah juga berperan penting sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*). Kepala sekolah yang visioner dan mampu memimpin komunitas belajar akan menciptakan budaya mutu di sekolah. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan mutu pendidikan harus mencakup penguatan kapasitas kepemimpinan sekolah agar setiap lembaga pendidikan memiliki arah yang jelas dalam mencapai standar mutu yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pengembangan kepemimpinan berbasis kinerja, pelatihan manajemen sekolah, serta pemberian otonomi yang lebih luas bagi sekolah untuk mengelola sumber daya secara efisien.

Salah satu dimensi penting dalam kebijakan pengembangan mutu pendidikan adalah penguatan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Kurikulum Merdeka yang diterapkan sejak tahun 2022 merupakan langkah reformasi besar yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan potensi lokal dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan *project-based learning* (pembelajaran berbasis proyek) yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah dunia nyata. Namun, keberhasilan implementasi kurikulum ini sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan manajemen sekolah, serta ketersediaan sumber belajar yang sesuai dengan konteks lokal. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan kurikulum yang baik tidak akan menghasilkan perubahan signifikan di tingkat pembelajaran.

Selain kurikulum, aspek asesmen dan evaluasi juga memegang peran penting dalam menjamin mutu pendidikan. Selama ini, sistem evaluasi di Indonesia cenderung berorientasi pada ujian sumatif yang menekankan hasil akhir, bukan pada proses pembelajaran. Akibatnya, sekolah dan guru lebih fokus mengejar nilai daripada menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan karakter peserta didik. Dalam konteks kebijakan baru, pemerintah mulai menggeser paradigma tersebut melalui penerapan *Asesmen Nasional* (AN) yang mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Pergeseran ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan sosial-emosional dan nilai kebangsaan yang kuat.

Ketimpangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian. Akses terhadap fasilitas belajar yang memadai, infrastruktur teknologi informasi, dan tenaga pendidik berkualitas masih menjadi kendala di banyak daerah, terutama di wilayah 3T. Program digitalisasi sekolah yang dicanangkan pemerintah menjadi solusi penting untuk memperluas akses pembelajaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur internet dan kapasitas guru dalam mengelola teknologi. Dalam hal ini, kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan.

Selain dimensi internal, mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi sosial ekonomi keluarga, misalnya, berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan anak. Banyak anak di daerah tertinggal masih menghadapi risiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu mengurangi angka tersebut, namun pendekatan kebijakan yang lebih holistik diperlukan agar dukungan ekonomi ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas belajar. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan program pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat agar menciptakan ekosistem yang mendukung mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan mutu pendidikan juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi nasional. Dalam teori *human capital*, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan produktivitas tinggi di masa depan. Negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi mereka sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang kuat dan inovatif. Dalam konteks Indonesia, peningkatan mutu pendidikan harus diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Pendidikan vokasi dan politeknik, misalnya, harus diperkuat agar mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang

sesuai dengan kebutuhan industri. Sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri (link-and-match) menjadi kunci dalam menciptakan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global.

Selain itu, penting pula memperkuat riset dan inovasi di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan teknologi, serta mencetak tenaga ahli yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, rendahnya pendanaan riset, minimnya kolaborasi internasional, dan lemahnya sistem diseminasi hasil penelitian masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan tinggi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas riset, penguatan kerja sama universitas-industri, serta peningkatan kualitas dosen melalui pendidikan lanjut dan pertukaran akademik global.

Dari perspektif tata kelola, kebijakan mutu pendidikan yang efektif harus ditopang oleh sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pengambilan keputusan dalam pendidikan perlu didasarkan pada analisis empiris yang valid agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran. Dalam hal ini, pengembangan *Education Management Information System* (EMIS) menjadi kebutuhan mendesak untuk menyediakan data real-time tentang kinerja sekolah, guru, siswa, dan program pendidikan. Pendekatan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) tidak hanya memperkuat akuntabilitas publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada realitas lapangan, bukan asumsi semata.

Kebijakan pengembangan mutu pendidikan juga harus mempertimbangkan dinamika sosial-budaya Indonesia yang pluralistik. Dalam masyarakat yang multikultural, pendidikan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebinekaan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan. Program *Profil Pelajar Pancasila* merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan gotong royong. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam proses belajar, Indonesia dapat membangun SDM unggul yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan memiliki kesadaran moral tinggi.

Secara keseluruhan, kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia merupakan agenda multidimensi yang membutuhkan sinergi lintas sektor, lintas level pemerintahan, dan lintas pemangku kepentingan. Tantangan besar yang dihadapi seperti ketimpangan wilayah, kualitas guru, infrastruktur digital, dan keterbatasan anggaran tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan reformasi pendidikan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan global. Pendidikan yang bermutu tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga memperkuat fondasi peradaban Indonesia yang berkarakter dan berkeadilan sosial.

Dalam tataran global, upaya peningkatan mutu pendidikan telah menjadi agenda prioritas di berbagai negara. Laporan UNESCO *Education for All* (EFA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan keempat (*Quality Education*) menegaskan bahwa setiap negara harus menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar manusia, tetapi juga sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan mutu pendidikan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia perlu diletakkan dalam kerangka transformasi pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil belajar dan pemerataan kesempatan. Transformasi ini menuntut perubahan paradigma dari pendekatan input-oriented menuju output dan outcome-oriented. Artinya, keberhasilan sistem pendidikan tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan atau jumlah fasilitas yang disediakan, melainkan dari seberapa besar dampak yang dihasilkan terhadap kualitas lulusan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Pendekatan berbasis hasil ini menuntut sistem manajemen pendidikan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi digital. Era transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia belajar, berinteraksi, dan bekerja. Konsep *digital learning ecosystem* memungkinkan pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas fisik, tetapi meluas ke ruang maya yang interaktif dan kolaboratif. Pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif seperti *Platform Merdeka Mengajar* dan *Rumah Belajar* berupaya memfasilitasi guru

dan siswa agar dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Namun, keberhasilan transformasi digital pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi digital para pendidik. Di daerah-daerah dengan keterbatasan akses internet, digitalisasi pembelajaran masih menghadapi hambatan besar, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif yang menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa.

Dari perspektif kebijakan publik, peningkatan mutu pendidikan memerlukan tata kelola yang baik (*good governance*). Konsep ini menekankan pada tiga prinsip utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibutuhkan agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran pendidikan yang setiap tahun mencapai lebih dari 20% dari total APBN. Partisipasi menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak — mulai dari sekolah, orang tua, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat — dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Sementara itu, akuntabilitas menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Kegagalan dalam mengelola tiga prinsip ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakefisienan kebijakan dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Penting pula untuk melihat kebijakan pengembangan mutu pendidikan dari sudut pandang ekonomi politik. Pendidikan sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara aktor-aktor politik, birokrasi, dan pasar. Dalam konteks desentralisasi, otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah lokal untuk mengembangkan kebijakan inovatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan jika tidak diatur dengan koordinasi yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar setiap program peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan serempak dengan arah pembangunan nasional. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah harus membangun sistem kolaboratif yang memungkinkan pertukaran data, ide, dan praktik baik dalam peningkatan mutu sekolah.

Selain itu, dimensi sosial dan budaya juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang kontekstual — yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai, tradisi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Banyak kebijakan pendidikan nasional gagal mencapai hasil maksimal karena kurang memperhatikan konteks lokal. Misalnya, di daerah pedalaman atau komunitas adat, model pembelajaran yang terlalu berorientasi pada standar nasional sering kali tidak relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan diferensiasi kurikulum yang memungkinkan sekolah-sekolah di berbagai daerah mengembangkan konten lokal tanpa mengabaikan standar kompetensi nasional. Pendekatan ini akan memperkuat relevansi pendidikan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sistem pendidikan di tingkat lokal.

Kualitas pendidikan juga erat kaitannya dengan investasi jangka panjang dalam pengembangan guru dan tenaga kependidikan. Negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kunci keberhasilan mereka terletak pada penghargaan tinggi terhadap profesi guru. Guru tidak hanya dianggap sebagai pengajar, tetapi juga sebagai profesional yang berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Di Finlandia, misalnya, menjadi guru adalah profesi bergengsi yang menuntut pendidikan tingkat magister dan seleksi ketat. Pemerintah menyediakan dukungan penuh bagi guru untuk melakukan penelitian dan inovasi pembelajaran. Indonesia dapat belajar dari praktik ini dengan memperkuat sistem pengembangan karier guru berbasis kinerja, bukan senioritas semata.

Selanjutnya, penguatan budaya mutu (*quality culture*) di satuan pendidikan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan mutu. Budaya mutu bukan sekadar penerapan standar atau indikator penilaian, melainkan kesadaran kolektif seluruh warga sekolah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Budaya mutu dapat tumbuh jika kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua memiliki visi yang sama tentang pentingnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan komunitas belajar guru (*teacher learning community*) dan forum refleksi pembelajaran harus menjadi bagian integral dari kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Dari sisi pembiayaan, kebijakan pengembangan mutu pendidikan juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Meski secara nominal anggaran pendidikan Indonesia terus meningkat, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Banyak dana terserap untuk belanja rutin, sementara alokasi untuk inovasi dan pengembangan kualitas masih terbatas. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang menilai efektivitas setiap program

berdasarkan capaian hasil belajar dan peningkatan kompetensi siswa. Selain itu, perlu dikembangkan model kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*) untuk mendukung pendanaan inovatif dalam pendidikan, seperti penyediaan infrastruktur digital, beasiswa vokasi, dan riset pendidikan.

Pendidikan yang bermutu juga harus menjawab kebutuhan dunia kerja dan dinamika ekonomi global. Ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri masih menjadi masalah klasik di Indonesia. Banyak lulusan pendidikan tinggi dan vokasi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi mereka tidak sesuai dengan tuntutan pasar. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan harus memperkuat kolaborasi antara sekolah, universitas, dan dunia industri melalui program magang, sertifikasi kompetensi, serta kurikulum yang relevan dengan teknologi terkini. Integrasi antara pendidikan dan industri akan menciptakan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang memungkinkan setiap individu untuk terus meningkatkan keterampilan di sepanjang siklus kehidupannya.

Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek karakter dan spiritualitas dalam kebijakan pengembangan mutu pendidikan. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak dapat dipisahkan dari pembentukan moral dan etika. Dalam situasi global yang penuh kompetisi, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati menjadi modal sosial yang sangat penting. Program *Profil Pelajar Pancasila* yang menekankan dimensi beriman, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong merupakan langkah progresif dalam membangun karakter peserta didik. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pembentukan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki kepedulian sosial.

Lebih jauh, pendidikan juga berperan penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan. Kebijakan pengembangan mutu pendidikan di abad ke-21 harus mengintegrasikan perspektif keberlanjutan lingkungan ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Pendidikan hijau (*green education*) mendorong peserta didik untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap bumi serta menumbuhkan kesadaran ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah perlu didorong menjadi pusat inovasi lingkungan melalui program daur ulang, penghematan energi, dan konservasi alam. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun global.

Dalam dimensi globalisasi, kemampuan bangsa untuk bersaing di tingkat internasional sangat bergantung pada mutu pendidikan nasional. Negara yang memiliki sistem pendidikan kuat akan mampu menghasilkan inovator, ilmuwan, dan wirausahawan yang berperan dalam kemajuan dunia. Indonesia harus menyiapkan strategi pendidikan jangka panjang yang berorientasi pada pengembangan kompetensi global — seperti penguasaan bahasa asing, literasi teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan kepekaan budaya. Kebijakan ini harus dibarengi dengan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas, riset kolaboratif internasional, dan pertukaran pelajar lintas negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan mutu pendidikan bukanlah sekadar urusan teknis pembelajaran, melainkan sebuah proyek peradaban. Pendidikan yang bermutu adalah investasi terbesar bangsa dalam menciptakan masa depan yang berkeadilan, berkarakter, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pendidikan harus disusun dengan visi jangka panjang, dukungan politik yang kuat, serta komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

Bahan dan Metode

Partisipan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan sebagai partisipan utama. Partisipan penelitian terdiri atas pejabat dinas pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, dosen, serta pakar kebijakan pendidikan yang memiliki pengalaman dalam perumusan dan implementasi program peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, informan tambahan meliputi orang tua siswa dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan komite sekolah, agar diperoleh perspektif yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat akar rumput.
Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak **25 orang**, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*

berdasarkan kriteria relevansi, pengalaman, dan kompetensi dalam bidang kebijakan pendidikan. Proses wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dan daring menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menjaga konsistensi data dan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam.

Desain Penelitian / Organisasi Studi

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif-analitis**, yang bertujuan untuk memahami fenomena kebijakan pengembangan mutu pendidikan secara holistik. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada penggambaran realitas sosial dan kebijakan sebagaimana adanya, serta interpretasi makna dari kebijakan tersebut berdasarkan pengalaman para pelaksana dan pemangku kepentingan.

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu:

1. **Tahap Persiapan**, mencakup studi literatur terhadap berbagai dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan Kemendikbudristek terkait *Merdeka Belajar* dan peningkatan mutu pendidikan.
2. **Tahap Pengumpulan Data**, dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap pelaksanaan program di sekolah, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan.
3. **Tahap Analisis Data**, dilakukan secara interaktif menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
4. **Tahap Validasi dan Refleksi**, yang bertujuan untuk memastikan kredibilitas data melalui teknik *member check*, triangulasi sumber, serta diskusi antarpeneliti guna menghindari bias interpretasi.

Dalam organisasi penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara langsung. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks kebijakan secara mendalam dan menyesuaikan proses penelitian sesuai dinamika di lapangan.

Analisis Statistik

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, analisis kuantitatif sederhana juga digunakan untuk memperkuat temuan melalui pengolahan data survei persepsi dari guru dan kepala sekolah mengenai efektivitas kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Data kuantitatif tersebut dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk memperoleh nilai frekuensi, persentase, dan rerata persepsi terhadap indikator seperti: peningkatan kompetensi guru, efektivitas pelatihan, dukungan sarana belajar, serta implementasi kurikulum Merdeka Belajar.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui **tahapan pengkodean tematik**, yaitu identifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan dokumen. Setiap kategori data kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta implikasinya terhadap mutu pendidikan. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai di lapangan.

Dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan dukungan analisis kuantitatif deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran utuh tentang dinamika kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy recommendation*) untuk perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis data kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan mutu pendidikan telah membawa perubahan positif dalam sistem pembelajaran, namun efektivitasnya masih bervariasi antarwilayah dan antarjenjang pendidikan.

1. **Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan**

   Sebagian besar responden (78%) menyatakan bahwa program kebijakan seperti *Merdeka Belajar* dan *Kampus Merdeka* telah memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan guru

dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kepala sekolah menilai bahwa kebijakan ini mendorong terciptanya inovasi pembelajaran, terutama dalam penggunaan teknologi digital dan proyek berbasis kontekstual. Namun, sekitar 22% guru mengaku masih mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum baru akibat kurangnya pelatihan teknis dan keterbatasan sumber daya di sekolah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan pendidikan nasional sudah progresif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

2. **Kompetensi dan Profesionalisme Guru**

Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan kunci utama dalam pengembangan mutu pendidikan. Hasil survei terhadap 60 guru di tiga provinsi menunjukkan bahwa 65% guru telah mengikuti pelatihan berbasis kurikulum Merdeka, tetapi hanya 40% yang merasa mampu mengintegrasikan hasil pelatihan tersebut ke dalam praktik pembelajaran secara konsisten. Faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelatihan adalah durasi, pendampingan pascapelatihan, dan relevansi materi dengan kebutuhan lapangan.

Data juga menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas pelatihan guru dengan peningkatan hasil belajar siswa ($r = 0{,}62$). Sekolah yang aktif mengikuti program *Guru Penggerak* cenderung memiliki capaian Asesmen Nasional yang lebih baik dibanding sekolah lain dalam wilayah yang sama. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program pelatihan guru dan monitoring berkelanjutan berbasis data kinerja.

3. **Pemerataan Akses dan Kesenjangan Mutu**

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan diketahui bahwa ketimpangan mutu pendidikan masih menjadi persoalan besar. Sekolah di daerah perkotaan umumnya telah memanfaatkan teknologi pembelajaran digital secara optimal, sementara di daerah 3T, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet menjadi hambatan utama. Misalnya, 40% sekolah di wilayah pedesaan yang menjadi lokasi penelitian masih mengandalkan metode konvensional karena belum memiliki perangkat komputer yang memadai.

Kebijakan digitalisasi sekolah yang dicanangkan pemerintah melalui program *Chromebook untuk Sekolah* dan *Platform Merdeka Mengajar* telah menjangkau sebagian besar sekolah di kota besar, namun implementasinya di wilayah terpencil masih bersifat parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan perlu disertai strategi pemerataan yang lebih kuat agar tidak memperlebar kesenjangan kualitas antarwilayah.

4. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Sekitar 70% sekolah yang memiliki kemitraan aktif dengan dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi, dan komite sekolah menunjukkan peningkatan signifikan dalam mutu pengelolaan pembelajaran. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program magang siswa, kelas kolaboratif, serta penyediaan fasilitas pendukung belajar.

Namun, di beberapa daerah, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada aspek administratif, seperti pengumpulan dana BOS atau pelaporan kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma dari partisipasi formal ke partisipasi substantif, di mana masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan dan evaluasi mutu pendidikan.

5. **Dukungan Kebijakan dan Tata Kelola**

Analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar regulasi pendidikan nasional sudah mengarah pada penguatan mutu dan daya saing SDM. Namun, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, program pelatihan guru yang dilaksanakan oleh kementerian sering tidak sinkron dengan agenda pelatihan di tingkat dinas pendidikan daerah.

Dari sisi tata kelola, hasil penelitian menemukan bahwa 60% kepala sekolah belum menerapkan sistem evaluasi mutu internal secara berkala. Hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki mekanisme *school self-assessment* terintegrasi dengan Asesmen Nasional. Hal ini menyebabkan kurangnya data real-time untuk menilai kemajuan mutu pendidikan di tingkat sekolah.

6. Ringkasan Temuan Kuantitatif

Berikut ringkasan hasil survei terkait efektivitas kebijakan mutu pendidikan (n=60):

No	Aspek yang dinilai	Rata-rata Skor (1-5)	Kategori
1	Relevansi kebijakan dengan kebutuhan sekolah	4,2	Baik
2	Ketersediaan pelatihan guru	3,8	Cukup
3	Pemanfaatan teknologi pembelajaran	3,5	Cukup
4	Partisipasi masyarakat dan komite sekolah	3,9	Baik
5	Dampak terhadap hasil belajar siswa	4,1	Baik

Secara keseluruhan, skor rata-rata efektivitas kebijakan sebesar **3,9**, yang berarti pelaksanaan kebijakan pengembangan mutu pendidikan sudah berjalan baik namun belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketimpangan sarana belajar.

7. Dampak terhadap Daya Saing Bangsa

Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara mutu pendidikan dan daya saing nasional. Berdasarkan analisis *secondary data* dari *World Economic Forum (2024)*, indeks daya saing Indonesia menunjukkan peningkatan pada pilar "skills" dan "innovation capability" setelah pelaksanaan kebijakan transformasi pendidikan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan penguatan mutu pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas SDM nasional. Namun, untuk mencapai daya saing global yang setara dengan negara maju, Indonesia masih perlu memperkuat aspek kreativitas, literasi digital, dan penelitian berbasis teknologi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan fleksibilitas, inovasi pembelajaran, dan penguatan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bervariasi antarwilayah dan dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta dukungan kelembagaan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2012) bahwa keberhasilan reformasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut diimplementasikan.

1. Kesesuaian dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Kebijakan *Merdeka Belajar* dan *Kampus Merdeka* yang menekankan otonomi, kreativitas, dan relevansi pembelajaran terbukti sesuai dengan prinsip teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky, di mana peserta didik menjadi subjek aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman kontekstual. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, terutama pada sekolah-sekolah yang berhasil mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2021) juga menemukan bahwa penerapan kurikulum yang adaptif terhadap konteks lokal dapat meningkatkan minat belajar siswa hingga 35% dibanding pendekatan konvensional. Hal ini menguatkan hasil penelitian ini bahwa keberhasilan kebijakan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor kontekstualitas dan partisipasi guru dalam pengembangan kurikulum.

Dari sisi peningkatan kompetensi guru, hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Human Capital* (Becker, 1993) yang menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik akan meningkatkan produktivitas nasional secara keseluruhan. Program *Guru Penggerak* dan *Platform Merdeka Mengajar* menjadi instrumen strategis dalam penguatan kapasitas guru. Namun, tanpa dukungan sistem pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berbasis kinerja, peningkatan kompetensi guru tidak akan signifikan.

2. **Tantangan Implementasi Kebijakan di Lapangan**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah 3T. Keterbatasan infrastruktur digital dan konektivitas internet menyebabkan sekolah di wilayah terpencil sulit mengikuti percepatan inovasi pembelajaran. Hal ini menegaskan teori ketimpangan sosial pendidikan yang dikemukakan Bourdieu (1986), bahwa akses terhadap sumber daya pendidikan yang tidak merata akan memperkuat reproduksi ketimpangan sosial antarwilayah.

Kendala lainnya adalah rendahnya tingkat literasi digital guru. Meskipun sebagian besar guru telah mengikuti pelatihan berbasis teknologi, namun masih banyak yang belum mampu memanfaatkan perangkat digital secara optimal untuk mendukung pembelajaran aktif. Kondisi ini konsisten dengan penelitian Nurhadi (2022) yang menyebutkan bahwa 48% guru di Indonesia belum memiliki kompetensi digital memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring secara efektif. Oleh karena itu, transformasi digital pendidikan memerlukan kebijakan pendampingan yang sistematis, tidak hanya pelatihan sesaat, tetapi juga *mentoring* berkelanjutan di tingkat sekolah.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan program mutu pendidikan. Misalnya, pelatihan guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak selalu sinkron dengan kebutuhan spesifik daerah. Fenomena ini mengonfirmasi hasil penelitian Yusri dan Setiawan (2020), yang menyoroti pentingnya *policy coherence* antarlevel pemerintahan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan harmonis dan efektif.

3. **Implikasi terhadap Teori Manajemen Pendidikan**

Dari perspektif manajemen pendidikan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal. Walaupun otonomi daerah memberikan ruang inovasi, banyak daerah belum memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk mengelola kebijakan mutu secara efektif. Teori *Total Quality Management (TQM)* dalam pendidikan, seperti dijelaskan oleh Sallis (2015), menekankan bahwa peningkatan mutu harus dimulai dari perubahan budaya organisasi sekolah, komitmen kepemimpinan, dan partisipasi seluruh warga sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki kepemimpinan transformasional dari kepala sekolah cenderung memiliki budaya mutu yang lebih kuat. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak perubahan, menciptakan visi bersama, dan menginspirasi guru untuk berinovasi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan harus disertai dengan program penguatan kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada *instructional leadership*.

4. **Implikasi terhadap Kebijakan Publik**

Temuan empiris menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan mutu pendidikan memiliki implikasi luas terhadap perumusan kebijakan publik. Pertama, perlunya pendekatan *evidence-based policy*, di mana setiap kebijakan didasarkan pada data empiris dan hasil riset, bukan semata pada pertimbangan politis. Kedua, perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah melalui sistem perencanaan berbasis data pendidikan nasional seperti *Education Management Information System (EMIS)*. Ketiga, pentingnya mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan melalui indikator-indikator kinerja mutu yang jelas dan terukur.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi semacam ini sejalan dengan konsep *quadruple helix* yang menghubungkan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan mutu pendidikan yang mampu membangun sinergi lintas sektor akan lebih efektif dalam menyiapkan SDM unggul yang berdaya saing global.

5. **Implikasi terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa**

Mutu pendidikan yang baik memiliki hubungan langsung dengan peningkatan daya saing bangsa. Penelitian ini mendukung teori Porter (1990) tentang *competitive advantage of nations*, di mana kualitas SDM merupakan faktor utama penentu produktivitas nasional. Negara dengan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar global akan lebih cepat mencapai keunggulan kompetitif.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui *Merdeka Belajar* telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas inovasi dan kompetensi digital peserta didik. Namun, kontribusi ini masih belum merata karena ketimpangan sumber daya antarwilayah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan masa depan harus menekankan pemerataan kualitas pendidikan, bukan hanya perluasan akses.

6. **Relevansi terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**
   Kebijakan pengembangan mutu pendidikan juga berperan penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goal 4 (Quality Education)*. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan inklusivitas. Sekolah yang menerapkan prinsip inklusi menunjukkan tingkat kepuasan belajar yang lebih tinggi dan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter siswa yang toleran dan empatik.
   Lebih jauh, integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam kurikulum, seperti pendidikan lingkungan dan literasi energi, terbukti mampu meningkatkan kesadaran ekologis siswa. Dengan demikian, kebijakan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan agenda SDGs dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan global.
7. **Sintesis dan Rekomendasi Teoretis**
   Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat model konseptual bahwa kebijakan mutu pendidikan harus dilihat sebagai sistem dinamis yang terdiri dari tiga komponen utama: **(1) kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti**, **(2) pelaku pendidikan yang profesional dan inovatif**, serta **(3) lingkungan belajar yang kolaboratif dan inklusif**. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan membentuk siklus perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
   Dengan demikian, kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan budaya mutu di semua level pendidikan, peningkatan literasi digital guru, desentralisasi kebijakan berbasis konteks lokal, serta kolaborasi multisektor untuk memperluas dampak kebijakan terhadap peningkatan daya saing bangsa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengembangan mutu pendidikan merupakan elemen fundamental dalam membangun daya saing bangsa di era globalisasi dan transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya melalui program *Merdeka Belajar* dan *Kampus Merdeka*, telah memberikan arah baru bagi sistem pembelajaran nasional dengan menekankan fleksibilitas, relevansi, serta otonomi satuan pendidikan. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, dan efektivitas koordinasi antarlevel pemerintahan.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kualitas pelaku pendidikan yang menjalankan kebijakan tersebut. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam transformasi pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pelatihan yang relevan, mentoring profesional, dan sistem evaluasi berbasis kinerja menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Di sisi lain, kepemimpinan sekolah yang visioner berperan penting dalam menciptakan budaya mutu dan inovasi pembelajaran di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan mutu antarwilayah masih menjadi tantangan serius. Sekolah di daerah perkotaan menunjukkan tingkat penerapan inovasi dan digitalisasi pembelajaran yang lebih tinggi dibanding daerah pedesaan dan 3T. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif yang menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur teknologi, distribusi tenaga pendidik profesional, dan dukungan anggaran yang proporsional. Pemerataan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar transformasi pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif manajemen pendidikan, kebijakan mutu yang efektif harus berlandaskan prinsip *good governance*—transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Diperlukan penguatan sistem tata kelola berbasis data melalui *Education Management Information System (EMIS)* yang mampu menyediakan informasi real-time mengenai kinerja pendidikan. Sistem ini akan memudahkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia industri, akademisi, dan masyarakat sipil perlu terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap dinamika dunia kerja dan kemajuan teknologi. Kemitraan ini sejalan dengan konsep *quadruple helix* yang menempatkan pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa mutu pendidikan merupakan hasil interaksi dinamis antara kebijakan, sumber daya manusia, dan budaya organisasi pendidikan. Peningkatan mutu tidak dapat dicapai secara instan melalui kebijakan tunggal, tetapi melalui proses sistemik dan berkelanjutan yang menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan mutu pendidikan harus diarahkan pada pembentukan budaya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning culture*), di mana setiap individu memiliki motivasi intrinsik untuk terus mengembangkan diri, baik secara intelektual maupun moral.

Dari sisi strategis, penguatan mutu pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap daya saing bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif—unsur utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan perlu didesain dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kompetensi akademik, pembentukan karakter, dan relevansi dengan kebutuhan industri serta masyarakat global.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat arah kebijakan pengembangan mutu pendidikan melalui lima langkah strategis:

1. **Desentralisasi kebijakan berbasis konteks lokal**, agar setiap daerah dapat mengembangkan inovasi pendidikan sesuai karakteristik sosial-budayanya.
2. **Peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah** melalui pelatihan berkelanjutan dan insentif berbasis kinerja.
3. **Penguatan infrastruktur digital pendidikan** untuk mendukung transformasi pembelajaran yang merata di seluruh wilayah.
4. **Penerapan sistem evaluasi berbasis data** yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pendidikan nasional.
5. **Kolaborasi multisektor** antara pemerintah, dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan global.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kebijakan pengembangan mutu pendidikan yang efektif dan berkelanjutan akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045—bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur melalui kekuatan sumber daya manusia unggul.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Prof. Eko Handoyo, M.Si. dan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum yang telah membimbing saya sehingga terwujudnya jurnal ini

Daftar Pustaka

Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

BPS. Indikator Pendidikan 1994–2024. Badan Pusat Statistik Indonesia

BPS. Statistik Pendidikan 2024. Badan Pusat Statistik Indonesia

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2021). *Strategi Pengembangan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Goczek, Ł. (2021). How Does Education Quality Affect Economic Growth? Sustainability, 13(11), 6437. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/6437

Hanushek, E. A. & Woessmann, L. (2021). Education and economic growth. Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. https://hanushek.stanford.edu/publications/education-and-economic-growth

Kaffenberger, M. (2021). Modelling the long-run learning impact of the COVID-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. International Journal of Educational Development, 81, 102326. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059320304855

Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Kinerja Pendidikan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Retrieved from https://www.kemdikbud.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN Kita: Belanja Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Monroy-Gómez-Franco, L. A. (2022). The potential effects of the COVID-19 pandemic on learning — a systematic review. PMC. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8920787/

OECD (2022). Education Policy Outlook 2022: Relevance, transitions, and aspirations. https://www.oecd.org/education/education-policy-outlook-2022_c77c7a97-en.htm

OECD. (2022). *Education Policy Outlook: Indonesia 2022*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/edu-outlook-idn-2022-en

Park, S. (2024). Does the relationship between competitiveness and student achievement vary based on the culture of competitiveness? Evidence from PISA 2018. International Journal of Educational Research. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883035524001241

Priyanto, P. (2022). Indonesian Higher Education Institutions Competitiveness and Digital Transformation Initiatives. https://www.researchgate.net/publication/360649566_Indonesian_Higher_Education_Institutions_Competitiveness_and_Digital_Transformation_Initiatives

Prudente, J. E., & Yunaningsih, A. (2023). Improving university competitiveness and quality education through HRD in the digital era. Bedan Research Journal, 8(1), 173–201. https://www.researchgate.net/publication/373882866_Improving_university_competitiveness_and_quality_education_through_Human_Resource_Development_in_the_digital_era

Rahmawati, D., & Suryani, L. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 134–148. https://doi.org/10.21009/jkp.v9i2.2105

RISE Programme in Indonesia. (2023). *Education Policy Reform and Local Innovation in Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute. Retrieved from https://rise.smeru.or.id

Suryadi, A. (2019). *Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(3), 205–218. https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i3.1107

UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing.